



**SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
Nomor : 13/SEK/SK.KU.1/1/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DAN PENANDA TANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), DAN STAF PENGELOLA PNPB DAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN PADA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- b. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Mahkamah Agung RI, Ketua Mahkamah Agung RI mendelegasikan Jabatan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- d. Bahwa agar Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2023 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab, dipandang perlu ditertibkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- e. Bahwa Pejabat yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
7. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di

Bawahnya;

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 177/KMA/SK/XII/2015 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya;
13. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 93/SEK/SK.KU1.1/XII/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya Tahun Anggaran 2024;
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Bangkalan

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MENCABUT SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA BANGKALAN NOMOR : 1863/SEK.PA.W13-A30/KU1.1.1/SK/8/2023 TANGGAL 1 AGUSTUS 2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN MEMBAYAR (SPM), PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini ;

Kedua : Pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dalam melaksanakan Anggaran agar memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

Ketiga : Pejabat yang namanya tersebut dalam diktum pertama ini bertanggungjawab dan berkewajiban untuk membuat evaluasi dan menyampaikan laporan realisasi anggaran DIPA Tahun Anggaran 2024 setiap bulan kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pengadilan Agama Bangkalan ;

- Keempat : Kepada mereka yang namanya tersebut pada dictum pertama mendapatkan honor dari DIPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 2 Januari 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pamekasan
4. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
Nomor : 13/SEK/SK.KU.1/I/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**DAFTAR PEJABAT PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN / PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
PENGUJI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DAN PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR (SPM), STAF PENGELOLA PNB DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLA ANGGARAN
1.	Salma Nurkhafidoh, S.Kom. NIP. 19970104 202012 2 008 Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Puspita Nur Astuti, S.E., M.H. NIP. 19830927 200904 2 006 Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Pejabat Penguji SPP dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM).
3.	Faiza Amalia Yunan, S.Ak. NIP : 19970127 202012 2 009 Penata Muda (III/a)	Penyusun Laporan Keuangan	Staf Pengelola Keuangan
4.	Intan Pratiwi, S.E. NIP : 19970716 202203 2 009 Penata Muda (III/a)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Staf Pengelola Keuangan

Di tetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 2 Januari 2024



Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Bangkalan

[Signature]
MARIS DWLSUTIYONO